

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Akib, H, 2010, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf, diakses pada 9 Maret 2020.
- Akib, H, dan Tarigan, A, 2008, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, scholar.google.co.id/citations?user=xgg8yZ8AAAAJ&hl=id, diakses 5 Mei 2019.
- Anonim, 2013, *Arti Lambang Kota Serang*, <https://serang.serangkota.go.id/pages/arti-lambang-kota-serang>, diakses pada 6 April 2021.
- Bachruddin, D. T, 2018, Implementasi Program JAMSOSRATU dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten Pandeglang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Vol. 2, No.1, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=implementasi+jamsosratu&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3Dwsfwdjhiz2YJ, diakses pada 5 Mei 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah Ke Depan*, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2019, *Kota Serang dalam Angka 2019*, Banten
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Statistik Daerah Kota Serang 2020*, Banten
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Kota Serang dalam Angka 2020*, Banten
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, Banten
- Daigneault, P, 2014, *Three Paradigms of Social Assistance*. SAGE Publication, 10.1177/2158244014559020.sgo.sagepub.com, diakses pada 21 April 2020.
- Dinas Sosial Provinsi Banten, 2019, *Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu Tahun 2019*, Banten
- Edwards, C. G, 1980, *Implementing Public Policy*, Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press.
- Faturochman, dkk, 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan : UGM.

- Habibullah, 2017, Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.492>, diakses pada 5 Desember 2019.
- Hazrumy, A, 2016, Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU) di Provinsi Banten. Thesis. Universitas Pasundan. <http://repository.unpas.ac.id/3518/>, diakses pada 5 Mei 2019.
- Husna, N, 2014, Ilmu Kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, Vol.20, No. 29, <http://dx.doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114>, diakses pada 9 Mei 2019.
- Kementrian Sosial, 2021, Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021, Jakarta
- Kurnadi, D. B, 2011, *Praktek Penelitian Kualitatif : Pengalaman dari UGM*. Research Centre for Politics and Government, FISIPOL : UGM.
- Kurnia, E, 2016, Implementasi Program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, <http://repository.fisip-untirta.ac.id/751/>, diakses pada 5 Mei 2019.
- Midgley, J, 1999, *Social Development : The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications Ltd.
- Nugroho, R, 2008, *Public Policy : Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Implementasi, Evaluai, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : PT, Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta : Media Wacana.
- Paskarina, C, 2007, Pembangunan Manusia Berbasis Investasi Sosial. Artikel Ilmiah, FISIP, Universitas Padjajaran, http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/20080225_104150.pdf, diakses pada 29 Mei 2019.
- Purnama, A, 2015. Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal. *Jurnal PKS*, Vol. 14, No. 2, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/download/1317/724>, diakses pada 15 Desember 2019.

- Ritzer, G, 2012, *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabarisman, M, 2019, Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan. *Sosio Informa*, Vol. 5, No. 2, <https://Ejournal.Kemsos.Go.Id/Index.Php/Sosioinforma/Article/View/1715/995>, diakses pada 17 Januari 2020.
- Santoso, P, 2010, *Analaisi Kebijakan Publik*. Research Centre for Politics and Government, FISIPOL : UGM.
- Silitonga, F. R, 2017, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E, 2013, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. 2015, Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia : Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Jurnal Sosio Humaniora*, Vol. 12, No. 1, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>, diakses pada 5 Mei 2015.
- Sulistiyani, T. A, 1998, Mekanisme Sosial dan Kebijakan Jaminan Sosial Lansia : Perbedaan Desa Industri dan Desa Agraris. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Sumarto, ,2014, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. UGM Press.
- Sunggono, B, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika,
- Supriyanto, W. R, Ramdhani, R. E, dan Rahmadan, E, 2014, *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Sutisna, A, 2017, Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia : Indonesian Science Review*, Vol. 2, No. 2. Universitas Negeri Semarang. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>, diakses pada 15 April 2021.
- Taufiqurokhman, 2015, Pandeglang dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, moestopo.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Pandeglang-Dalam-Implementasi-Kebijakan-Peningkatan-IPM-Sebuah-Disertasi-Oleh-Dr.-Taufiqurokhman.-M.Si_.pdf, diakses pada 5 Mei 2019.
- Wahab, A. S, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J, 2008, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Widodo, J, 2021, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Whiting, K, 2020, *These are The Top 10 Job Skills of Tomorrow-and How Long It Takes to Learn Them*. <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/>, diakses pada 6 April 2021.
- Winarno, B, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : MedPress
- Yin, K. R, 2013, *Studi Kasus dan Metode*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

DOKUMEN HUKUM

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan JAMSOSRATU.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program JAMSOSRATU.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.



Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.